



---

# Laporan Keanggotaan Primo Indo Ikan Larantuka dalam Seafood Savers

---

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan  
oleh PT Primo Indo Ikan Larantuka periode Mei  
2107 – Oktober 2017

---

**Saraswati Adityarini - Capture Fisheries Officer for Skipjack,  
Tuna and Tuna Like Commodities**

---

## Informasi Umum

1. **Lokasi** : Kabupaten Flores Timur  
Survey pertama : 8 Oktober 2018  
Survey kedua : 5 Desember 2017  
Jumlah petambak/nelayan : Jumlah armad Pole and Line yang menjadi supply chain PT Primo Indo Ikan Larantuka untuk komoditi yang didaftarkan yaitu cakalang dan yellowfin tuna adal 17 armada.
2. **Praktik budi daya/budi daya**
  - Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : Ikan madidihang/ Yellowfin Tuna minimal 20Kg/ ekor, cakalang 1 kg/ ekor
  - Metode budi daya/penangkapan : Pancing Pole and Line dan Handline/ Pancing Ulur
  - Kisaran harga : Rp 15.000/Kg untuk cakalang dan Rp 45.000/Kg nya untuk tuna

Sistem pembelian langsung dilakukan nelayan ke perusahaan. Dimulai dengan kapten armada pole and line menginfokan ke pihak PT Primo Indo Ikan bahwa akan bersandar dan melakukan menjual hasil tangkapan ke perusahaan. Lokasi bongkar PT Primo Indo Ikan sendiri da di PPI Amagarapati , sehingga staff perusahaan serta petugas QC akan turun ke dermaga. Saat proses bongkar petugas perusahaan akan melakukan penimbangan, pencatatan hasil tangkapan, selain itu diberi individual tagging untuk tuna yang meliputi: tanggal masuk kapal, nama kapal, nomor ikan,berat bersih, grade, bentuk produk dan urutan kapal. Untuk hasil tangkapan cakalang pemberian tagging akan diberikana saat sudah diletakan dalam rak-rak untuk disimpan dalam cold storage di Pabrik, karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tuna yang ditangkap oleh nelayan. Proses grading atau pemilahan sesuai dengan kualitasnya, sudah dilakukan untuk hasil tangkapan yang telah ditimbang. Setelah selesai proses ini selanjutnya hasil tangkapan dibawa ke pabrik dengan jarak kurang lebih 45 menit

### 3. Kapasitas produksi

Berdasarkan data statistic perikanan tagkap Prov NTT tahun 2016 untuk produksi ikan cakalang Kab. Flores Timur mencapai 935 ton dan untuk ikan yellowfin tuna mencapai 418 ton. Dimana Kabupaten Flores Timur telah berkontribusi sebanyak 22% produksi ikan cakalang dalam produksi ikan cakalang Provinsi NTT, dan sebesar 14% untuk ikan Madidihan Yellowfin Tuna. Sepanjang bulan Mei - Desember tahun 2017 produksi ikan cakalang PT Primo Indo Ikan sebanyak 721.583 Kg ikan cakalang dan untuk ikan madidihang sebanyak 19.212 Kg. Dengan trip penangkapan sebnyak 891 trip, selama Mei- Desember 2017. Bila menggunakan perbandingan produksi PT Primo Indo Ikan pada Mei-Desember 2017 dengan data statistik Kab. Flores Timur bahwa PT Primo Indo Ikan Larantuka telah berontribusi sekitar 77% produksi ikan cakalang sedangkan untuk Yellowfin tuna sebesar 5%.

#### 4. Keterangan tambahan

- a. Telah dilakukan pelatihan BMP Cakalang dan data compliance kepada nelayan supply chain PT Primo Indo Ikan sebanyak 23 orang pada 5 Desember 2017, dengan nilai rata-rata pretest 56,7 dan posttest 69,6 dan terlihat terdapat peningkatan pemahaman untuk cara penangkapan cakalang dengan pole and line yang ramah lingkungan sekitar 19 %. Dan nilai compliencenya sebesar 63,65%..
- b. PT Primoo Indo Ikan Larantuka telah melakukan pencatatan dengan format logbook pemerintah dan dilaporkan untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory. Disampaikan oleh Pihak PT Primo Indo Ikan Larantuka bahwa kedepan akan semakin memperkuat pencatatan di level nelayan tidak hanya di Perusahaan saja..
- c. Dampak dari UU 23/2014 begitu pula dengan proses pengurusan perijinan dari perikana Pole and Line di Larantuka, dimana tidak efisien dari sisi waktu, tenaga dan materi, dimana untuk proses pengurusan masih dilakukan di DKP Provinsi NTT. Namun sayangnya di kabupaten sendiri belum ada UPT atau keterwakilan dari DKP Provinsi untuk mengurangi kendala tersebut, DKP Kab. Flores Timur juga sudah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan perijinan atau dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penangkapan nelayan pole and line.

<b>No</b>	<b>Nama Kapal</b>	<b>Tanda Selar</b>
1	Yulien 01	GT. 26 No. 1164/Mma
2	Flotim 33	GT. 22 No. 85/OOf
3	Inka 698	GT.30 No. 56/00a
4	Flotim 12B	GT. 22 No. 82/OOf
5	Flotim19	GT.22 No.10/00f
6	Ard 07	GT 20 No. 57/OOf
7	NB 47 Delvino	GT. 6 No. 761/K.41
8	NB 28/ Deo Gratia	GT. 13 No. 113/00f
9	Flotim 09	GT. 22 No. 15/OOf
10	NB 63	GT. 13 No. 112/OOf
11	Bahtera Flotim 3-13	GT. 19 No.6966/Bc
12	NB 119	GT. 13 No. 121/OOf
13	Bahtera Flotim 2-13	GT. 19 No.6965/Bc
14	Flotim 30	GT. 22 No. 84/OOf
15	Flotim31	GT. 22 No. 88/Oof
16	Bahtera Krukab	GT. 26 No. 496/Ab
17	Anugerah Mina 09	GT. 13 No. 105/OOf

Rincian evaluasi keanggotaan PT Primo Indo Ikan Larantuka berdasarkan *Fisheries Improvement Program (FIP)* yang telah dilaksanakan:

DETAIL ACTION (for the Seafood Savers member)	OUTPUT AND INDICATOR FOR DETAIL ACTION (for the Seafood Savers member)	ACTION LEAD & PARTNERS	SEAFOOD SAVERS stage	HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
			INTERM EDIATE		
<p>1. pengambilan data logbook (Analisa CPUE) dilanjutkan untuk alat tangkap handline dan pole and line</p> <p>*LINK 1.2.3 A,B</p> <p>pendataan ini didahului dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikasi kapal anggota PT Primo Indo Ikan yang menggunakan alat tangkap handline dan pole and line</li> <li>- melaksanakan identifikasi apakah ada kapal supplier PT Primo Indo yang terdaftar di RFMO</li> </ul>	<p>data logbook tersedia dan terupdate secara periodik data logbook meliputi (target dan non target) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berat Tuna</li> <li>- panjang tuna</li> <li>- tangkapan sampingan</li> <li>- umpan</li> <li>- kematangan gonad tuna</li> <li>- jumlah armada (effort)</li> <li>- pendataan komposisi tangkapan handline dan pole and line</li> </ul>	<p>PIC : WWF-Indonesia</p> <p>PIV : PT Primo Indo Ikan</p> <p>action : Nelayan anggota</p>		<p>PT Primo Indo Ikan Larantuka telah melakukan pencatatan dengan format logbook pemerintah dan dilaporkan untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory. Disampaikan oleh Pihak PT Primo Indo Ikan Larantuka bahwa kedepan akan semakin memperkuat pencatatan di level nelayan tidak hanya di Perusahaan saja.</p>	<p>Meningkatkan pencatatan logbook oleh nelayan anggota PT Primo Indo Ikan</p>
<p>2. menghubungkan data logbook dengan DKP prov NTT</p> <p>*LINK 1.2.3 A,B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menelaraskan form logbook dengan DKP Kabupaten/ Propinsi dan Komnas Kajiskan/ Pusriskan</li> </ul>	<p>data logbook masuk ke dalam sistem pendataan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Flores Timur dan NTT untuk mendukung buku statistik perikanan Kabupaten dan propinsi</p>	<p>WWF-Indonesia, DKP Prov NTT, DKP Kab Flores Timur</p>		<p>Secara tidak langsung belum, tapi PT Primo Indo Ikan telah melaporkan logbook untuk keperluan pengurusan SHTI/ Catch Certificat karena bersifat mandatory</p>	<p>Perlu adanya pertemuan untuk membahas sinkronisasi dan integrasi pencatatan dan skema pelaporan pendataan perikanan dari nelayan ke tingkat kabupaten dan provinsi.</p>

<p>3. Advokasi kepada DKP Kab Flores Timur untuk memiliki program enumerator untuk pendataan Tuna</p> <p><b>*LINK 1.2.3 C</b></p>	<p>Logbook dijalankan oleh DKP setempat</p>	<p>DKP Kab Flores Timur, DKP Prop NTT, WWF-Indonesia</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Perlu adanya pertemuan untuk membahas sinkronisasi dan integrasi pencatatan dan skema pelaporan pendataan perikanan dari nelayan ke tingkat kabupaten dan provinsi.</p>
<p>1. Melakukan sosialisasi kepada anggota nelayan tentang :</p> <p>a. KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan surat edarannya</p> <p>b. Kepmen 47/ 2016</p> <p>*cakupan nelayan lebih besar lebih baik</p> <p><b>*LINK 1.2.2 B, 1.2.3 C, 2.3.2.B</b></p> <p>- menyesuaikan proses penangkapan sesuai dengan pengendalian penangkapan (control rule ) dan Harvest Strategy tuna di WPP 713 oleh Subdit ZEEI</p> <p>- untuk armada yang beroperasi di WPP 573 agar menyesuaikan mekanisme control rule yang dibuat oleh IOTC dengan catatan apabila kapal sudah terdaftar dan mekanisme pengendalian penangkapan sudah tersedia dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia</p>	<p>Nelayan penangkap tuna mengerti, memahami, dan menjalankan aturan-aturan tentang garis besar isi dalam KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan Kepmen 47/ 2016</p>	<p>DKP Kab.Flores Timur,DKP Propinsi NTT, WWF Indonesia, Badan Penyuluh PT Primo Indo Ikan</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Diadakannya pertemuan untuk mensosialisasikan nelayan anggota PT Primo Indo Ikan untuk menjalankan aturan-aturan tentang garis besar isi dalam KEPMEN KP no 107 tahun 2015 mengenai RPP-TCT dan Kepmen 47/ 2016</p>

<p>1. Melaksanakan konsultasi dokumen strategi pemanfaatan tuna target (yang disusun pada P1.1.1) di tingkat stakeholder</p> <p><b>*LINK 3.1.1</b></p>	<p>Peraturan pemanfaatan spesies tuna target yang didukung oleh nelayan dan di dalamnya meliputi adanya :</p> <p>(1) rencana pengurangan pemanfaatan (bila perlu) jika status stok sudah mendekati limit reference point,</p> <p>(2) mengadopsi prinsip ketidakpastian (uncertainties), kehati-hatian,</p> <p>(3) mekanisme evaluasi reguler terhadap performa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal terkait serta</p> <p>(4) tujuan jangka pendek dan jangka panjang</p>	<p>DKP Kab.Flores Timur, DKP Propinsi NTT, dan Nelayan</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Perlu pertemuan untuk membahas action lans PT Primo Indo Ikan sekaligus untuk menghimpun masukan dan esepkatan melaksanakan bersama lintas stakeholder.</p>
<p>2. Perusahaan menetapkan kebijakan internal untuk membeli tuna hasil tangkapan dengan handline sesuai dengan hasil dalam dokumen strategi pemanfaatan</p> <p><b>*LINK 1.2.1, 1.2.3 C, 2.3.2.B</b></p>	<p>terdapat dokumen kebijakan internal perusahaan untuk membeli tuna hasil tangkapan dengan handline sesuai dengan hasil dalam dokumen strategi pemanfaatan</p>	<p>PT Primo Indo Ikan</p>		<p>Sudah ada kebijakan internal perusahaan terkait pengaturan hasil tangkapan untuk ukuran ikan cakalang min.1 Kg keatas, untuk ikan madidihang min. 20 Kg keatas</p>	<p>Setelah tersedianya dokumen Strategi pemanfaatan cakalang dan tuna Nasional yang final, kemudian disosialisasikan untuk diadopsi.</p>
<p>1. membuat protokol pengumpulan data (mendukung aktifitas 1.1.1)</p>	<p>tersedianya protokol pengumpulan data yang telah disepakati dengan Komaskajiskan, Pusriskan, DKP Propinsi, dan Kabupaten</p>	<p>WWF</p>		<p>Form pendataan masih menggunakan dengan frm logbook sesuai dengan Permen KP 48/2014, namun masih untuk skala industrial</p>	<p>Akan dikembangkan form pendataan disesuaikan dengan skala penangkapan dari armada Pole and Line di Flores Timur yang kemudian dikonsultasikan dan disepakati oleh Komaskajiskan, Pusriskan, DKP</p>

					Propinsi, dan Kabupaten
<p>2. dilakukannya aktivitas pengumpulan data secara reguler</p> <p><b>*LINK 1.1.1. A,B</b></p>	tersedia data yang sudah dianalisis secara ilmiah	Nelayan, DKP.Propinsi NTT		Perusahaan telah ikut mendukung dalam beberapa kajian stok termasuk analisa dugaan stok dan Analisa Harvet Strategy , dengan turut serta melakukan pengumpulan data secara reguler.	Perusahaan akan berpartisipasi dalam beberapa kajian mendukung implementasi action plans ini
<p>3. kebijakan internal perusahaan untuk mengarahkan pengepul menyediakan dokumen pencatatan hasil tangkapan tuna pada saat menjual tuna ke perusahaan</p> <p><b>*LINK 1.1.1 C</b></p>	dokumen pencatatan disertakan pada setiap transaksi dengan perusahaan oleh pengepul	PT Primo Indo Ikan ,		Perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan langsung dengan nelayan tanpa perantara pengepul dan wajib lengkap dokumen dan perijinan untuk setiap nelayan kapal anggota	Perusahaan akan membangun kebijakan internal untuk mendukung penguatan pencatatan dan pelaporan oleh nelayan anggota
melakukan penilaian terhadap aspek-aspek pada prinsip 1.2.4 sesuai dengan prasyarat disamping	dokumen hasil penilaian tersedia	WWF Indonesia learning center		Perusahaan telah berkontribusi dalam pengumpulan data untuk kajian Analisa stok spesies perikanan umpan tuna	
1. Melakukan kajian RBF untuk spesies primer dari hasil penangkapan tuna (relevan dengan 1.1.1)	Tersedianya laporan RBF untuk spesies primer meliputi produktivitas spesies primer (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata	WWF Indonesia learning center		Perusahaan telah berkontribusi dalam proses pengambilan data untuk kajian RBF spesies primer cakalang pole and line di Kabupaten Flores Timur	Akan dilanjutkan dengan desiminasi dan konsultasi public hasil kajian di Kabupaten Flores Timur



	umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies primer (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan)			yang dilakukan oleh Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	
2. Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies primer (relevan dengan 1.1.1)	Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya	WWF Indonesia learning center		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
relevan dengan P1.1.1 bahwa untuk spesies primer telah dilaksanakan melalui Kajian RBF hasil kajian dicantumkan dalam dokumen harvest strategy	Hasil rekomendasi pengelolaan masuk ke dalam dokumen harvest strategy	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi NTT		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)  konsultasi publik ini diperkuat dengan peraturan dan atau kajian yang berhubungan dengan spesies primer dalam proses penangkapan Pole and Line dan handline	hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi NTT		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur

Melakukan kajian RBF (PSA, SICA, CSA) terhadap spesies primer (relevan dengan kajian RBF yang dilaksanakan untuk P1.1.1)	rekomendasi pengelolaan tersedia melalui hasil kajian RBF yang relevan dengan P1.1.1	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Telah dilakukan, dan Perusahaan telah berkontribusi dalam proses pengambilan data untuk kajian RBF spesies primer cakalang pole and line di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Akan dilanjutkan dengan desiminasi dan konsultasi public hasil kajian di Kabupaten Flores Timur
konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)	hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
1. Melakukan kajian RBF untuk spesies sekunder dari hasil penangkapan tuna (yang relevan dengan 1.1.1) - termasuk ikan umpan	Tersedianya laporan RBF untuk spesies primer meliputi produktivitas spesies sekunder (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies primer (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan)	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilaksanakan kajian RBF untuk spesies sekunder termasuk untuk spesies ika umpan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur

2. Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies sekunder (relevan dengan 1.1.1)	Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
relevan dengan P1.1.1 bahwa untuk spesies primer telah dilaksanakan melalui Kajian RBF hasil kajian dicantumkan dalam dokumen harvest strategy	Hasil rekomendasi pengelolaan masuk ke dalam dokumen harvest strategy	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)	hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melakukan kajian RBF (PSA, SICA, CSA) terhadap spesies primer (relevan dengan kajian RBF yang dilaksanakan untuk P1.1.1)	rekomendasi pengelolaan tersedia melalui hasil kajian RBF yang relevan dengan P1.1.1	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
konsultasi publik untuk rekomendasi dari hasil kajian RBF (relevan dengan P1.1.1)	hasil rekomendasi pengelolaan disepakati oleh stakeholder	Learning Center, Nelayan, DKP Kab Flores Timur, Propinsi		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur

Melakukan kajian biologis dari spesies ETP yang ada di wilayah penangkapan khususnya WPP 713 dan 573	Tersedianya informasi mengenai produktivitas spesies ETP (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies ETP (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan)	Universitas, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji kerentanan spesies terhadap overfishing (kajian PSA) untuk spesies ETP	Tersedianya informasi mengenai status kerentanan spesies terhadap overfishing serta strategi pengelolaannya	Universitas, DKP Kab, WWF , Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies ETP  *LINK 2.3.3	tersedianya kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies ETP yang meliputi strategi pemulihan stok spesies ETP	Universitas, WWF		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies ETP di tingkat nelayan	peraturan pengelolaan spesies ETP didukung oleh nelayan	WWF, Universitas, Nelayan		Belum dilaksanakan	Setelah dilakukan kajian untuk strategi pegelolaan spesies ETP

Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies ETP di tingkat kabupaten / Kota  <b>*LINK 2.4.2 C</b>	draft mendapat persetujuan di tingkat kabupaten / kota	WWF, Universitas, Nelayan, DKP Kab		Belum dilaksanakan	Setelah dilakukan kajian untuk strategi pengelolaan spesies ETP
Mendorongkan terbentuknya peraturan di tingkat kabupaten terkait dengan pengelolaan spesies ETP	Tersedianya peraturan yang mendukung pengelolaan perikanan dari spesies ETP	DKP Kab, WWF, Universitas, Nelayan		Belum dilaksanakan	Setelah dilakukan kajian untuk strategi pengelolaan spesies ETP
melakukan kajian komposisi tangkapan dari data logbook yang tersedia yang menyebutkan ada/ tidaknya spesies ETP yang tertangkap  <b>*LINK 2.3.2.A</b>	tersedianya laporan kajian komposisi tangkapan dari data logbook yang menyebutkan ada/ tidaknya spesies ETP yang tertangkap	Universitas, WWF		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan kajian RBF terhadap dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline	tersedianya laporan ilmiah mengenai dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline	Learning Center		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan habitat di tingkat nelayan dari hasil kajian RBF pada poin 2.4.1	peraturan pengelolaan habitat didukung oleh nelayan	WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan habitat di tingkat KKPN Laut Sawu	draft mendapat persetujuan di tingkat KKPN Laut Sawu	WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder

					terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Mendorongkan terbentuknya peraturan di tingkat KKP N Laut Sawu terkait dengan pengelolaan habitat  <b>*LINK 2.3.2C,D</b>	Tersedianya peraturan yang mendukung pengelolaan perikanan dari habitat	WWF, PT Primo Indo Ikan , Universitas, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan kajian RBF (CSA- Consequence Spatial Analysis)) terhadap dampak aktivitas pemanfaatan spesies tuna target menggunakan alat tangkap handline	tersedianya laporan ilmiah mengenai dampak aktivitas pemanfaatantuna target menggunakan alat tangkap handline	Learning Center		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan kajian RBF terhadap status ekosistem	tersedianya laporan ilmiah mengenai status ekosistem dari kajian RBF	Learning Center		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Melakukan konsultasi publik untuk mengkaji ekosistem spesies Tuna target tangkapan menggunakan RBF (SICA)	Tersedianya informasi mengenai status ekosistem spesies Tuna target tangkapan serta strategi pengelolaannya	Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
konsultasi publik tentang zonasi	tersedianya legalitas zona larangan dan peta zonasi pemanfaatan tuna	Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder

					terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan sosialisasi zona larangan kepada masyarakat termasuk membangun alat-alat komunikasinya (billboard, poster, pamflet)	masyarakat memahami dan mematuhi peraturan tentang zona larangan	Learning Center, DKP Kab, DKP Prop, WWF, Nelayan PT Primo Indo Ikan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
melakukan kajian pengumpulan data yang dilakukan secara periodik	tersedianya laporan ilmiah yang meliputi dampak pemanfaatan spesies target terhadap elemen ekosistem kunci (mangsa utama, predator, kompetitor, komposisi komunitas) setiap 2 tahun	Universitas, Nelayan, WWF		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
<p>1. Melanjutkan proses advokasi ikan umpan di Larantuka kepada DKP Kab dan Propinsi</p> <p>2. Mendorong pendaftaran rumpon sesuai regulasi dari KKP terutama berkaitan dengan amnesti rumpon yang akan dilaksanakan pada tahun 2018</p>		Learning center, WWF		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Mendorong penguatan kapasitas nelayan anggota dalam skema pengelolaan perikanan  <b>*LINK 3.2.3</b>	<p>1. legalitas kelompok Nelayan anggota Flores Timur tersedia</p> <p>2. legalitas praktik perikanan oleh nelayan anggota (surat</p>	WWF PT Primo Indo Ikan		Perusahaan sangat mendukung dalam membantu nelayan anggota untuk pengurusan kelengkapan dokumen	Perusahaan akan membangun kebijakan internal untuk mendukung penguatan pencatatan dan pelaporan oleh nelayan anggota

	keterangan terdaftar, ijin penangkapan, pencatatan) 3. Terwujudnya skema pengelolaan perikanan selain pemantauan kawasan pemanfaatan dari anggota nelayan penangkap tuna di Flores Timur			perijinan	
memperkuat peran KKPN Laut Sawu melalui team building, training tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk mendukung peran sebagai lembaga pengelola Tuna di Flores Timur dan sekitarnya	menguatnya peran dan leadership KKPN Laut Sawu untuk berperan sebagai Lembaga pengelola	WWF PT Primo Indo Ikan		Belum dilakukan	setelah disepakati waktu pelaksanaan dari hasil pertemuan pembahasan action plans bersama stakeholder terkait lainnya di Kab. Flores Timur
Mendorongkan terbentuknya POKMASWAS di tingkat KKPN Laut Sawu  <a href="#">*LINK 3.1.2</a>	terbentuknya POKMASWAS di tingkat kabupaten/kota yang memiliki skema pemantauan, pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan tuna serta dibekali dengan kewenangan untuk penegakan peraturan pengelolaan	WWF DKP Kabupaten, Nelayan PT Primo Indo Ikan		DKP Provinsi NTT telah mengesahkan sebanyak 17 POKMASWAS di Flores Timur. Dan total ada 264 POKMASWAS di NTT	Perlu dilakukan penguatan kelembagaan POKMASWAS dan skema pemantauan, pengaturan dan pengawasannya agar peran mereka dan program pemantauan, pengaturan dan pengawasan lebih efektif.
memasukkan poin pengawasan/ evaluasi reguler ke dalam RPP Tuna tingkat Nasional  <a href="#">*LINK 3.1.1</a>	poin pengawasan/ evaluasi reguler masuk ke dalam RPP Tuna tingkat Nasional (misalnya 1 tahun sekali)	Universitas, BPPL, WWF		Belum dilaksanakan	Akan dicoba didorongkan dalam beberapa pertemuan pembahasan pengelolaan perikanan tuna termasuk saat pertemuan review FIP tuna nasional.